

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam cakupan bisnis yang kompetitif, kinerja keuangan merupakan sebuah indikator utama yang berfungsi dalam menilai keberhasilan kegiatan operasional perusahaan (Aulia *et al.*, 2023). Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pertumbuhan keuangan menjadi fokus utama para pemangku kepentingan eksternal dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, dimana kinerja keuangan yang maksimal tidak hanya menggambarkan keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga mempunyai dampak signifikan terhadap nilai pasar dan reputasi suatu perusahaan (Glorya & Hwihanus, 2024). Dengan kondisi keuangan yang meningkat secara signifikan, investor dapat mempercayai suatu perusahaan dan menarik minat pembeli saham. Sebaliknya, kinerja keuangan yang tidak sehat dapat menimbulkan nilai pasar yang menurun dan pada akhirnya perusahaan akan kehilangan kepercayaan.

Di tingkat global yang semakin berfokus pada isu-isu keberlanjutan, perusahaan tak hanya diwajibkan untuk mencapai profit finansial, namun perusahaan diharuskan juga untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Adanya peningkatan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan dan sosial membuat perusahaan menyadari bahwa pentingnya mengikuti praktik bisnis yang berkelanjutan (Alyanti & Puspianti, 2019). Selain itu, tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan mengharuskan perusahaan untuk

mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Tindakan global yang diambil oleh setiap perusahaan memperlihatkan bagaimana mereka dapat mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi saat ini, sehingga pengungkapan informasi sosial dan lingkungan menjadi hal utama dalam menunjukkan pertanggungjawaban organisasi pada lingkungan dan sosial (Shafira & Sofie, 2024).

Organisasi yang mengadopsi prinsip keberlanjutan tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan regulasi dan tanggung jawab sosial saja, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menciptakan keunggulan yang lebih kompetitif. Perusahaan yang berhasil mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam bisnis mereka dianggap mampu menarik para investor yang semakin memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam mengambil keputusan mereka untuk berinvestasi (Farliani & Sofie, 2024). Tidak hanya investor, prinsip keberlanjutan juga dianggap dapat meningkatkan loyalitas konsumen yang lebih memihak pada produk atau layanan perusahaan yang memperhatikan sosial serta lingkungan. Penerapan prinsip keberlanjutan tak hanya berfungsi sebagai kewajiban, namun juga sebagai peluang strategis yang mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Contoh kongkrit pada perusahaan PT. Freeport Indonesia yang dilansir pada detik.com pada tahun 2018 dimana terjadi penurunan harga saham PT. Freeport Indonesia sebesar US\$2,73 atau sekitar 15% yang pada awalnya harga saham perusahaan ini sebesar US\$18,81 menjadi US\$16,08 mencerminkan dampak signifikan dari isu-isu strategis yang dihadapi perusahaan. Penurunan ini dipicu oleh pernyataan manajemen terkait permasalahan tambang di Indonesia yang belum terselesaikan secara tuntas. PT. Freeport Indonesia juga diduga melakukan pelanggaran terhadap regulasi perpajakan dan lingkungan hidup selama

menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa perusahaan telah merugikan negara melalui pemasukan negara bukan pajak sebanyak US\$445,96 juta atau kisaran 6 triliun rupiah. Selain itu, BPK yang melakukan pengauditan terhadap perusahaan ini menemukan adanya pembuangan limbah tambang yang sudah sampai ke laut lepas, hal ini telah menimbulkan kerugian lingkungan yang signifikan (Saputra, 2020).

Contoh lainnya yang dilansir dari rmol.id pada tahun 2023 dimana PT. RMK Energy Tbk yang menghadapi dampak signifikan dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus ini mencuat setelah perusahaan terbukti melepaskan sisa tambang ke arus sungai yang berada di sekitar area operasional perusahaan, yang menyebabkan populasi air dan kerusakan ekosistem. Pencemaran ini mendapat sorotan tajam dari beberapa pihak, seperti organisasi lingkungan hidup dan masyarakat yang berdampak langsung kepada perusahaan, dimana PT. RMK Energy mengalami penurunan saham hingga lebih dari 20%. Selain kerugian financial, PT. RMK Energy juga dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah, termasuk denda atas pelanggaran lingkungan yang mereka lakukan. Menurut laporan, total kerugian yang ditanggung oleh PT. RMK Energy akibat permasalahan ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun, yang terdiri dari biaya denda, rehabilitasi lingkungan, serta dampak terhadap kinerja operasional dan harga saham perusahaan.

Secara global, regulasi mengenai perlindungan lingkungan terus diperketat seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas industri terhadap lingkungan. Organisasi internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan ISO 14001 telah menetapkan standar yang digunakan oleh perusahaan global untuk

mengukur dan mengelola dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Penerapan regulasi dan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, sekaligus mendorong sebuah perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan (R. Aulia & Hadinata, 2019).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang tentang pengungkapan tanggung lingkungan dan sosial perusahaan melalui Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 dalam ayat (1) yang berbunyi bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” dan ayat (2) yang berbunyi bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang kegiatan operasionalnya berhubungan langsung dengan sumber daya alam diharuskan untuk mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

Upaya dalam mengatur hubungan antara ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan, pemerintah dalam hal ini sebagai pihak pengatur telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam peraturan tersebut, pasal 6 berbunyi bahwa “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS” yang menyiratkan bahwa perusahaan diharapkan mampu untuk mengkomunikasikan kinerja

perusahaan dan efek yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan. Adanya pengungkapan *annual report* yang berisi informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menjadi sarana transparansi, dimana para pemangku kepentingan, yakni investor, regulator, serta masyarakat dapat mengevaluasi sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan.

Perusahaan yang melakukan pengungkapan dianggap sebagai alat dalam mengkomunikasikan kinerja sosial, lingkungan, serta ekonomi suatu perusahaan. Pengungkapan yang perusahaan lakukan dibuat dalam *annual report* perusahaan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*), dimana laporan tersebut meliputi ketersediaan yang mencakup interaksi organisasi atau perusahaan terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengungkapan perusahaan yakni memberikan gambaran perusahaan terhadap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan dan dinilai oleh investor dan masyarakat sekitar (Mulyani *et al.*, 2025).

Corporate Social Responsibility oleh perusahaan mengarah pada proteksi lingkungan, hal ini berfokus pada solusi penggunaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Menurut Christian Limanto (2009), proteksi lingkungan yang perusahaan lakukan dapat mengeluarkan biaya yang sering disebut sebagai biaya lingkungan, dimana biaya ini terdiri atas biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya eksternal. Lebih lanjut, Christian Limanto, (2009) menjelaskan bahwa biaya lingkungan adalah biaya yang muncul karena disebabkan adanya kualitas lingkungan yang menurun dan wajib untuk dipulihkan, baik masa kini maupun di masa yang akan datang.

Perusahaan sering kali menganggap biaya lingkungan sebagai komponen yang mengurangi laba dalam laporan keuangan mereka. Padahal, alokasi biaya untuk pengelolaan lingkungan dianggap memiliki manfaat strategis bagi keberlanjutan perusahaan. Dimana perusahaan yang mengalokasikan biaya terhadap lingkungan menunjukkan komitmennya atas pertanggungjawabannya terhadap sosial, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perusahaan. Keberadaan biaya lingkungan juga dipandang sebagai investasi jangka panjang, dimana dampak positif yang dihasilkan tidak hanya sebatas pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menciptakan reputasi yang baik di mata pemangku kepentingan (Asjuwita & Agustin, 2020).

Hasporo & Adyaksana (2020) menjelaskan bahwa pengungkapan biaya lingkungan dalam *finansial statement* tidak hanya sebagai tambahan informasi, namun hal ini menunjukkan sebuah komitmen pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya yang lebih menyeluruh. Lebih lanjut, informasi yang disampaikan oleh perusahaan menjadi sangat krusial karena dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap citra perusahaan, dimana ini dapat mempengaruhi keputusan investasi yang diambil. Pengungkapan biaya lingkungan yang jelas tidak hanya meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Hasporo & Adyaksana, 2020).

Komponen lainnya yang dianggap penting dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* adalah *political cost*, dimana menurut Latifa & Haridhi (2016), *political cost* adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator biaya politik, hal ini disebabkan semakin tinggi standar yang harus

dipenuhi akibat nama perusahaan yang semakin besar. Perusahaan besar sering kali menjadi perhatian publik dan menghadapi tuntutan yang terus meningkat terkait pertanggungjawaban lingkungan mereka. Dalam hal ini, perusahaan diharuskan untuk berkontribusi lebih terhadap lingkungan sekitar (Latifa & Haridhi, 2016).

Watts dan Zimmerman (1978), mengungkapkan bahwa perusahaan harus mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang terkait dengan aktivitas politik seperti subsidi pemerintah, regulasi, pajak, beban, hak pekerja, dan lain sebagainya. *Political cost* juga dianggap sebagai tujuan perusahaan dalam mengurangi transfer aset dari perusahaan ke lain pihak atau perusahaan ingin meningkatkan transfer aset yang dirasakan oleh perusahaan, dimana dalam hal ini menjadikan pemicu manajer perusahaan untuk melakukan rekayasa laba. Pertumbuhan perusahaan yang dapat dilihat pada meningkatnya laba suatu perusahaan dikatakan mampu meningkatkan biaya dan efek politik yang harus ditanggung oleh perusahaan (Watts & Zimmerman, 1978).

Faktor lain yang juga dianggap dapat meningkatkan performa keuangan perusahaan yaitu struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan mengacu pada persentase pemegang saham dalam suatu perusahaan yang dihitung berdasarkan kepemilikan saham yang kemudian dibagi dengan keseluruhan saham perusahaan (Puniayasa & Triaryati, 2016). Persentase kepemilikan berperan dalam menentukan komposisi pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam suatu perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berfungsi sebagai alat dalam mereduksi masalah kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Proporsi kepemilikan manajerial yang lebih besar juga meselaraskan kepentingan antara manajer dan

pemilik saham, dimana pada akhirnya mampu meningkatkan performa keuangan (Meckling dan Jensen, 1986). Pada kepemilikan institusional yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan efektivitas pemantauan oleh investor institusional, sehingga membatasi manajer dalam berperilaku.

Nathanael dan Paramitha (2024) yang melakukan penelitian memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan dapat berpengaruh signifikan dengan kinerja keuangan, dimana peningkatan institusional mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pemantauan yang ketat terhadap manajemen mendorong keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan sehingga dapat menguntungkan perusahaan (Nathanael dan Paramitha, 2024). Namun, Made dan Nyoman (2016) yang melakukan penelitian berbanding terbalik, dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, hal ini disebabkan adanya kepemilikan institusional yang memiliki risiko lebih besar. Penyebab dari tingginya risiko adalah pengalokasian beberapa biaya yang lebih tinggi pada perusahaan, akibatnya *owner* perusahaan lebih sering bertindak pada kepentingan mereka.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai data yang tersedia pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kajiannya berfokus dalam perusahaan pertambangan batu bara yang telah terdaftar di BEI. Perusahaan dalam sektor ini memainkan peran penting dalam perekonomian, terkhusus dalam penyediaan sumber daya alam yang menjadi bahan utama di setiap industri. Perusahaan pertambangan batu bara memiliki tantangan utama selain pencapaian pada keuangan, dimana kegiatan operasi yang mereka jalankan dapat menerapkan prinsip keberlanjutan dan berkontribusi pada pembangunan keberlanjutan. Dalam hal ini, *enviromental cost*, *political cost*, dan struktur kepemilikan menjadi aspek krusial dalam praktik

bisnis dan akuntansi. Oleh karenanya, penelitian ini mempunyai tujuan menguraikan pengaruh *enviromental cost*, *political cost*, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Evada dkk (2018). Pada penelitian Evada dkk (2018) menerangkan bahwa Biaya Lingkungan, *Political Cost*, dan kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan pada kinerja keuangan perusahaan apabila diuji secara simultan. Hal ini mendukung Teori Agensi yang menunjukkan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan tekanan eksternal guna meningkatkan citra perusahaan dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Adanya biaya lingkungan yang perusahaan keluarkan dianggap mampu memperkuat hubungan antara *stakeholder* dan mampu memengaruhi performa keuangan sebuah perusahaan..

Terdapat hal yang menjadikan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu perusahaan yang menjadi fokus penelitian sebelumnya, dimana masa penelitian yang diambil pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2012-2017. Dalam penelitian ini adalah 2021-2024. Pada penelitian terdahulu *Political Cost*, *environmental cost*, dan kepemilikan asing menjadi variabel bebas dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel terikat. Pada penelitian ini variabel yang akan di uji adalah *Political Cost*, *Environmental Cost*, dan struktur kepemilikan dan kinerja keuangan dengan pengukuran menggunakan *Return On Aset* (ROA) sebagai variabel dependen. Variabel yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan dan penelitian sebelumnya menggunakan kepemilikan asing.

Berdasarkan penjelasan paragraf di atas, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji kembali dengan variabel struktur kepemilikan sebagai pembeda dari

penelitian sebelumnya dan menggunakan sampel perusahaan pertambangan pada tahun 2021-2023 yang terdaftar di BEI dengan judul “**Pengaruh *Political Cost*, *Environmental Cost*, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka ditentukan masalah pada penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah *political cost* berpengaruh pada kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
2. Apakah *envronmental cost* berpengaruh pada kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
5. Apakah *political cost*, *envronmental cost*, dan struktur kepemilikan berpengaruh pada kinerja keuangan pada perusahaan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah menganalisis dan menguji mengenai hal berikut ini.

1. Pengaruh *political cost* terhadap kinerja keuangan
2. Pengaruh *environmental cost* terhadap kinerja keuangan
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan
5. Pengaruh *political cost*, *environmental cost*, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berfungsi untuk menunjukkan gambaran manfaat serta hasil penelitian yang diperoleh, seperti perkembangan bidang ilmu yang diteliti serta bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Penelitian ini akan mencapai beberapa kegunaan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini akan mencapai kegunaan teoritis seperti menambahnya wawasan dan referensi terkait pengaruh *political cost*, *environmental cost*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi terhadap bidang akuntansi, khususnya pada keilmuan akuntansi yang berfokus pada sosial dan lingkungan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan referensi yang memberikan bukti nyata mengenai bagaimana pengaruh *political cost*, *environmental cost*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan

dan manfaat bagi para pemangku kepentingan sebuah perusahaan dalam membuat kebijakan untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada struktur kepenulisan yang berurut serta membantu pembaca dalam memahami penelitian ini dengan lebih mudah.

Bab I: Pendahuluan

Isi dari bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan terkait hal-hal umum mengenai isu ada penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Isi dari bab ini adalah penjelasan beberapa teori dan pendapat ahli terhadap penelitian yang sedang dilakukan di antaranya seperti landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Isi dari bab ini adalah penjelasan bagaimana penelitian dirancang dan prosedur dari penelitian ini memiliki fungsi untuk menghasilkan jawaban yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, rancangan penelitian, sampel dan populasi, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel pada penelitian, serta definisi operasional. Selain itu, bab ini juga berisi analisis data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji koefisien determinasi, hasil uji hipotesis, serta pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup

Isi dari bab ini berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan untuk peneliti berikutnya, dan batasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Stanford Research Institute (SRI) pertama kali mencetuskan istilah *stakeholder* pada tahun 1963 (Anam, 2021). Kemudian ditahun 1984 R. Edward Freeman mengembangkan *stakeholder theory* dimana dia menjelaskan bahwa manajemen perusahaan dituntut untuk memahami kepentingan dan kekhawatiran dari pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, masyarakat dan lain sebagainya. Dukungan dari pemangku kepentingan dianggap sebagai keberhasilan perusahaan, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang perusahaan. Freeman juga menjelaskan bahwa manajemen perusahaan dituntut untuk menjalin dan mengevaluasi hubungan dengan para pemangku kepentingan yang dalam hal ini memiliki tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan (Freeman & McVea, 2005).

Konsep dari teori ini memungkinkan organisasi untuk melibatkan setiap faktor-faktor sosial dan lingkungan ketika ingin mengambil keputusan strategis. Teori ini terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang. Organisasi telah mendapat banyak manfaat ketika menerapkan *stakeholder theory* dalam mendeteksi dampak sosial dan lingkungan pada kebijakan dan operasional mereka (Makmur, 2024). Stakeholder theory mampu membangun hubungan yang lebih berkelanjutan dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat, serta

membangun kepercayaan antara pihak lain dan meminimalkan risiko konflik yang merugikan organisasi.

Gantino (2016) mengungkapkan bahwa *stakeholders* terdiri dari dua individu atau lebih yang mampu memberikan pengaruh atau dipengaruhi oleh beberapa kebijakan untuk melaksanakan aktivitas operasi. *Stakeholder theory* menjadi alat yang digunakan untuk melihat bagaimana organisasi membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat terkhusus pada masalah lingkungan. Pandangan akuntansi lingkungan terhadap teori ini menyeroti pentingnya sebuah organisasi untuk mendokumentasikan serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan operasionalnya, dan berkomunikasi secara efektif terhadap tiap pemangku kepentingan yang mempunyai peran krusial dalam berjalannya organisasi. Teori ini memiliki tujuan penting dalam membantu manajemen organisasi guna meningkatkan penciptaan nilai perusahaan yang diakibatkan dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan serta kerugian yang muncul dari perusahaan terhadap stakeholder bisa diminimalisir (Makmur, 2024).

Pada intinya teori ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memerhatikan pemangku kepentingan sebagai langkah keberlanjutan perusahaan. Teori ini menekankan bahwa semua pihak harus mendapatkan keuntungan, tidak hanya perusahaan saja. Perusahaan tidak akan berkelanjutan apabila pihak pemangku kepentingan tidak memberikan dukungan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mengelola kegiatannya dengan mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan *stakeholders* agar perusahaan mampu bertahan dan berkelanjutan serta mampu berkompetisi dengan perusahaan lain.

2.1.2 *Legitimacy Theory*

Legitimacy theory pertama kali ditemukan oleh Dowling & Pfeffer pada tahun 1975 yang menjelaskan bahwa legitimasi merupakan pemanfaatan atau sumber potensial yang dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan hidup dan melanjutkan tujuan perusahaan. Nilai dari teori ini adalah konsep yang menjelaskan bahwa sebuah perusahaan atau organisasi berupaya untuk menciptakan mempertahankan dukungan dan penerimaan dari pemangku kepentingan atau *stakeholders* terkait isu-isu lingkungan.

Berdasarkan *legitimacy theory*, perusahaan diharuskan mengungkapkan secara berkelanjutan bahwa perusahaan telah menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. Dalam mencapai hal ini perusahaan melakukan pengungkapannya dalam laporan perusahaan, sehingga masyarakat atau pemangku kepentingan menganggap perusahaan telah memenuhi kewajiban dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu melakukan penilaian terhadap perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi lingkungan melalui laporan tahunan dan menunjukkan bahwa pengungkapan tersebut merupakan metode yang digunakan guna merespon tekanan pemangku kepentingan (Ulum, 2016).

Perusahaan yang menjalankan aktivitas operasionalnya memperoleh legitimasi dari masyarakat apabila menerapkan norma sosial yang berlaku pada pemangku kepentingan (Arisanty *et al.*, 2024). Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi harapan masyarakat sehingga mengurangi kemungkinan adanya tuntutan dari masyarakat (Suhartini & Megasyara, 2018). Pengungkapan informasi lingkungan sebagai wujud kepedulian perusahaan dengan isu-isu

lingkungan dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan serta berkontribusi

dalam peningkatan legitimasi di mata masyarakat (Fashikhah *et al.*, 2018). Peningkatan legitimasi perusahaan dicapai dengan berbagai aktivitas yang berdampak pada lingkungan operasionalnya, seperti pelaksanaan etika bisnis, kepedulian terhadap karyawan, dan pengembangan kinerja pegawai.

2.1.3 Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan)

Teori ini merupakan teori yang menekankan hubungan antara tujuan dan kinerja, dalam hal ini dianggap sebagai bentuk dari teori motivasi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Edwin Locke (1968), dimana teori ini lebih berfokus pada hubungan antara penetapan tujuan dan kinerja pekerjaan oleh suatu perusahaan. Teori ini menjelaskan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan melalui perilaku yang didasarkan pada tujuan dengan ketekunan yang kuat, seperti seseorang yang memulai proyek baru dimana mereka akan mempertahankan upaya guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, teori ini juga menjelaskan bahwa setiap orang memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh niat dan pikiran mereka.

Menurut Robbins & Judge (2021) terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi hubungan antara tujuan dan kinerja, yakni individu yang memiliki komitmen dalam mencapai tujuan, ciri khas tugas yang dikerjakan, serta *culture* dalam suatu perusahaan, dengan begitu terdapat organisasi yang lebih efisien dalam mencapai tujuan mereka dengan mengerjakan tugas secara bersama-sama serta terdapat juga organisasi yang mengerjakan tugas dengan pembagian secara individual. Teori ini memiliki efek negatif dalam penggunaannya oleh suatu organisasi, dimana hubungan antara tujuan dan performa dapat menurun yang disebabkan kurangnya kreativitas dan adaptasi yang dilakukan serta organisasi

yang tidak peduli terhadap situasi yang telah berubah. Dalam menghadapi situasi tersebut, manajer diharapkan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan organisasi guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Kinerja keuangan menjadi hal yang tersorot bagi pemangku kepentingan ketika menilai kinerja perusahaan, hal ini menjadikan para *stakeholder* terutama investor hanya terfokus pada pencapaian sebuah perusahaan melalui performa keuangan guna mendapatkan profit. Akibat dari hal tersebut, para manajemen perusahaan mulai menetapkan tujuan mereka yang terfokus pada keuntungan saja, dimana mereka akan berusaha semaksimal untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya. Seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan yang akhirnya mengubah tujuan mereka yang tidak hanya mencari keuntungan saja, namun mereka mulai melibatkan aspek lainnya seperti kinerja sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan munculnya tuntutan dari pemangku kepentingan yang telah peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Terkait dengan hal tersebut, penetapan tujuan menjadi hal yang penting bagi manajemen perusahaan guna mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Apabila perusahaan telah menentukan *goal setting* dalam mencapai keberlanjutan lingkungan perusahaan, maka mereka akan terfokus dalam meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan yang sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan.

2.1.4 Agency Theory

Teori ini dikenalkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menurut mereka terdapat hubungan antara *agent* atau pihak yang melaksanakan wewenang terhadap *principal* atau pihak yang memberikan wewenang tersebut. *Principal* digambarkan sebagai pemilik yang mempercayakan sebuah wewenang terhadap *agent* seperti manajer perusahaan dengan tujuan untuk mengelola

sumber daya dengan mengatasnamakan pemilik. Namun, sering terjadi konflik antara *principal* dan *agent* akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetris informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan merupakan bagian dari biaya keagenan, karena perbedaan tujuan antara manajemen dan pemilik perusahaan (Noviawan & Septiani, 2013).

Menurut Effendi & Pricilla, (2022), dalam pelaksanaan antara kedua pihak tersebut, *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan *principal*, hal ini disebabkan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. *Principal* mengharapkan *agent* (manajer) untuk bertindak guna meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan bagi *principal*. Namun, *agent* (manajer) sering kali memiliki kepentingan pribadi. Perbedaan tersebut menimbulkan konflik ketika pengambilan keputusan strategis seperti aktivitas pendanaan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dinamika dari konflik yang terjadi menciptakan situasi yang memerlukan rancangan mekanisme pengawasan intensif yang lebih efektif untuk mengatasi perbedaan kepentingan serta mampu menjembatani kesenjangan informasi yang pada akhirnya mencapai efisiensi dan hubungan agensi dapat *sustainable*.

Fokus dari teori ini adalah cara yang dilakukan oleh *principal* untuk mengurangi konflik seperti pemberian insentif atau pengawasan yang ketat. Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa struktur kepemilikan merupakan sebagai alat yang dapat menjadi solusi dari konflik di antara dua pihak tersebut. Mekanisme dari struktur kepemilikan melalui pendekatan keseimbangan informasi dianggap sebagai sebuah cara dalam mengurangi perbedaan data antara *insider* dan *outsider*. Jensen dan Meckling telah memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan positif digunakan guna mengurangi *agency cost* yang disebabkan dari

masalah konflik ini. Dengan demikian, struktur kepemilikan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham (Saifi, 2019).

Agency theory menekankan bahwa dengan mengatur komposisi kepemilikan, perusahaan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif yang sejalan dengan tujuan pemegang saham. Seperti kepemilikan manajerial yang dapat mendorong manajer untuk bertindak lebih berhati-hati dan berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, kepemilikan instusional berperan sebagai pengawas yang mampu menekan perilaku menyimpang dari manajemen karena mempunyai kekuatan kontrol yang lebih besar (Ngatno *et al.*, 2021).

2.1.5 Political Cost

Menurut Sarwinda dan Afriyenti (2015), *Polical cost* merupakan seluruh biaya yang perusahaan wajib keluarkan sebagai konsekuensi dari tindakan-tindakan politis, seperti pembayaran, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, pemenuhan kewajiban subsidi, serta biaya untuk upah buruh. Biaya ini muncul disebabkan adanya perselisihan kepentingan antara dua pihak, yakni perusahaan dan pemerintah yang berperan sebagai pembuat regulasi dan perwakilan dari masyarakat serta mengalihkan sebagian kekayaan perusahaan sesuai aturan yang diterapkan (Savitri, 2016), Pengalihan kekayaan perusahaan tergantung bagaimana pengungkapan informasi perusahaan yang pemerintah terima.

Political cost menyatakan bahwa perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya politis karena adanya laba perusahaan yang diperoleh terjadi peningkatan, hal ini disebabkan pemerintah yang menaikkan tarif pajak dan meminta perusahaan agar meningkatkan peranan perusahaan dalam layanan publik. Pemangku kepentingan melakukan pengawasan lebih terhadap

perusahaan-perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dalam menyikapi biaya politik yang semakin besar, manajer dari perusahaan tersebut mencari cara untuk mengurangi biaya politik tersebut, salah satunya manangguhkan laporan laba periode saat ini ke periode selanjutnya. Singkatnya, perusahaan besar sering kali mengecilkan laba yang dilaporkan dibanding dengan perusahaan kecil.

2.1.6 *Environmental Cost*

Menurut Miladiasari (2020), *environmental cost* merupakan biaya internal serta eksternal yang muncul akibat dari penyusutan lingkungan serta langkah perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus menanggung *environmental cost* sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan sebagai wujud pertanggungjawaban dari kegiatan operasional yang mengurangi kualitas lingkungan, baik secara finansial maupun non-keuangan. Biaya lingkungan setidaknya memiliki dua bagian utama, pertama adalah biaya privat yang dimana biaya-biaya secara langsung mempengaruhi laba bersih perusahaan, seperti biaya pengelolaan limbah, pemenuhan standar lingkungan, atau investasi pada teknologi ramah lingkungan. Dimensi yang kedua adalah biaya sosial yang dimana biaya-biaya yang ditanggung oleh individu masyarakat, atau lingkungan hidup akibat aktivitas perusahaan, akan tetapi tidak menjadi tanggung jawab perusahaan dan sulit apabila dihitung secara finansial.

Hansen dan Mowen (2007:12) menjelaskan bahwa *environmental cost* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori sebagai berikut

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*) merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas

yang mencegah terjadinya limbah atau hasil sisa perusahaan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

2. Biaya deteksi (*detection cost*) merupakan beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas yang dilakukan guna menentukan apakah proses, produk dan aktivitas lainnya di perusahaan telah mencapai standar lingkungan yang pada aturan atau tidak.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk aktivitas yang dilakukan akibat munculnya limbah dari proses produksi, namun limbahnya tidak dikeluarkan dari perusahaan.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas yang dilakukan selepas membuang limbah ke dalam lingkungan perusahaan.

Perusahaan diharapkan mengungkapkan laporan yang memperlihatkan perannya terhadap seluruh permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar lokasi operasional perusahaan. Dengan demikian, akan terlihat jelas besaran *environmental cost* yang perusahaan keluarkan guna mengelola lingkungan. Biaya lingkungan dapat tercermin melalui alokasi dana yang digunakan untuk program bina lingkungan yang umumnya disajikan dalam laporan keuangan maupun *annual report* perusahaan (Tunggal & Fachrurrozie, 2014).

2.1.7 Struktur Kepemilikan

Menurut Fadli dkk (2020), struktur kepemilikan adalah bentuk pemisahan antara manajer dan pemilik perusahaan. Pemilik atau pemegang saham merupakan pihak yang menanamkan modal dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik dan diberi kewenangan untuk

mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, tujuannya adalah mengarahkan manajer untuk bertindak sebagaimana dengan kepentingan publik. Sedangkan menurut Sugiarto (2009), struktur kepemilikan merupakan proporsi total saham yang dikuasai oleh pihak internal (*insider*) dengan total saham yang dikuasai oleh investor eksternal. Struktur kepemilikan mencerminkan proporsi antara kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai berikut.

1. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional dapat dikatakan sebagai institusi yang mempunyai hak kepemilikan dalam suatu perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dan lain sebagainya. Lembaga institusional umumnya mempunyai persentase kepemilikan yang cukup tinggi dalam suatu perusahaan. Keberadaan investor institusional ini berperan dalam memantau kinerja manajemen serta mengawasi pengambilan keputusan oleh pihak manajemen (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Secara umum, pemegang saham institusional mempunyai persentase kepemilikan yang lebih besar dalam perusahaan. Pengukuran kepemilikan institusional dapat dilakukan dengan memakai rasio antara jumlah lebar saham yang dimiliki oleh institusi dengan total jumlah saham yang beredar (Petta & Tarigan, 2017).

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer perusahaan mempunyai saham dalam sebuah perusahaan atau manajer yang juga sebagai investor dalam perusahaan tersebut. Pada laporan keuangan, situasi ini menunjukkan bahwa terdapat besarnya persentase kepemilikan saham yang manajer miliki. Informasi tersebut akan dicantumkan dalam CALK karena hal ini merupakan informasi penting

untuk pengguna laporan keuangan (Christiawan & Tarigan, 2007). Dalam cakupan ini, manajer akan merasakan langsung akibat keputusan yang mereka buat, mereka akan melihat bahwa keputusan yang diambil salah ketika dampaknya dirasakan juga oleh mereka. Kepemilikan manajerial mengurangi permasalahan di antara *agent* karena adanya kepentingan yang selaras antara manajer dan pemegang saham (Ningsih *et al.*, 2023).

2.1.8 Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan gambaran seberapa efektif dan efisien dari manajer perusahaan serta seberapa postif manajer perusahaan dalam memperoleh hasil yang memadai. Kinerja keuangan merupakan hal yang sulit dinilai melalui eksak karena terdapat aspek subjektif dan objektif. Keuangan perusahaan dapat dinilai melalui beberapa rasio seperti, rasio likuiditas, rasio *leverage*, dan sebagainya. Dengan melihat kinerja keuangan perusahaan, *stakeholder* dapat mengambil keputusan (Aulia *et al.*, 2023).

Para investor menggunakan kinerja keuangan perusahaan sebagai tolak ukur mereka dalam menilai atau menganalisis perusahaan. Penilaian yang dilakukan investor terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi informasi bagi mereka untuk mempertahankan investasi atau mengakhiri investasi terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan akan memperoleh nilai usaha yang tinggi apabila kinerja keuangan mereka baik yang membuat para investor tertarik untuk memasukkan modalnya yang membuat harga saham perusahaan akan meningkat atau harga saham menjadi fungsi dari nilai perusahaan (Makmur, 2024).

ROA (*Return On Asset*) merupakan salah satu rasio yang biasa digunakan sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan dan akan digunakan pada

penelitian ini. Rasio ini berfungsi sebagai gambaran dari besarnya persentase *return* dari keseluruhan aktiva (Makmur, 2024). Zainab & Burhany (2020), menjelaskan bahwa *retur on asset* merupakan tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan melalui penanaman modal atau kepemilikan aset.

Kinerja keuangan yang dihitung melalui rasio *retur on asset* yang lebih besar memperlihatkan bahwa pemanfaatan aset telah efisien serta efektif bagi keuntungan pemegang saham. Sebaliknya, *retur on asset* yang lebih kecil menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba lebih rendah serta biaya bunga yang tinggi yang disebabkan oleh utang yang dimiliki oleh perusahaan di atas batas normal yang mengakibatkan laba bersih dari suatu perusahaan relatif rendah (Dewata *et al.*, 2018).

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris adalah hal yang penting dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperlihatkan beberapa data dan temuan dari penelitian terdahulu yang relevan, sehingga peneliti dapat memberikan landasan teoretis serta empiris. Dengan bersumber dari penelitian sebelumnya yang serupa, penelitian ini dapat diperkuat validitas serta keandalan hasil penelitian mereka, terutama apabila terdapat variabel yang sama.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian dan Metode	Hasil Penelitian
1.	Dewata <i>et al.</i> , (2018)	Pengaruh Biaya Lingkungan, Kepemilikan Asing dan Political Cost terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel: X1: Biaya Lingkungan X2: Kepemilikan Asing X3: <i>Politcal Cost</i> Y: Kinerja Perusahaan	Biaya lingkungan dan <i>political cost</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara parsial, kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan secara parsial, sedangkan

		Pertambangan di Indonesia	Metode: Kuantitatif	secara simultan, biaya lingkungan, <i>political cost</i> dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
2.	Andini <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Kepemilikan Asing, <i>Political Cost</i> , Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia	Variabel: X1: Kepemilikan Asing X2: <i>Political Cost</i> X3: Kinerja Lingkungan X4: Pengungkapan Lingkungan Y: Kinerja Perusahaan Metode: Kuantitatif	Kepemilikan asing dan pengungkapan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan secara parsial, <i>political cost</i> dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara parsial.
3.	Saputra, (2020)	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengungkapan Lingkungan Sebagai Variabel Intervening (Studi Emperis Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)	Variabel: X1: Kinerja Lingkungan X2: Biaya Lingkungan Y: Kinerja Keuangan Z: Pengungkapan Lingkungan Metode: Kuantitatif	Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara parsial, sedangkan biaya lingkungan tidak berpengaruh positif secara parsial. Pengungkapan lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan, sedangkan biaya lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.
4.	Miladiasari, (2020)	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap Kinerja	Variabel: X1: Kinerja Lingkungan X2: Biaya Lingkungan	Kinerja lingkungan dan biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara parsial. <i>Good corporate governance</i> tidak memiliki

		Keuangan dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi	M: <i>Good Corporate Governance</i> Y: Kinerja Keuangan Metode: Kuantitatif	pengaruh sebagai variabel moderasi kinerja keuangan. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh sebagai variabel moderasi biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan.
5.	Nathanael & Paramitha, (2024)	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi	Variabel: X1: Struktur Kepemilikan X2: Ukuran Perusahaan Y: Kinerja Keuangan Metode: Kuantitatif	Struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
6.	Noviawan & Septiani, (2013)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel: X1: Ukuran Dewan Direksi X2: Ukuran Komite Audit X3: Kepemilikan Institusional X4: Kepemilikan Manajerial X5: Dewan Komisaris X6: Komisaris Independen Metode: Kuantitatif	Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan
7.	Saifi, (2019)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan	Variabel: X1: Komisaris Independen X2: Kepemilikan Institusional X3: Kepemilikan Manajerial Y1: ROE Y2: ROA	Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap ROE, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ROE. GCG dan Struktur

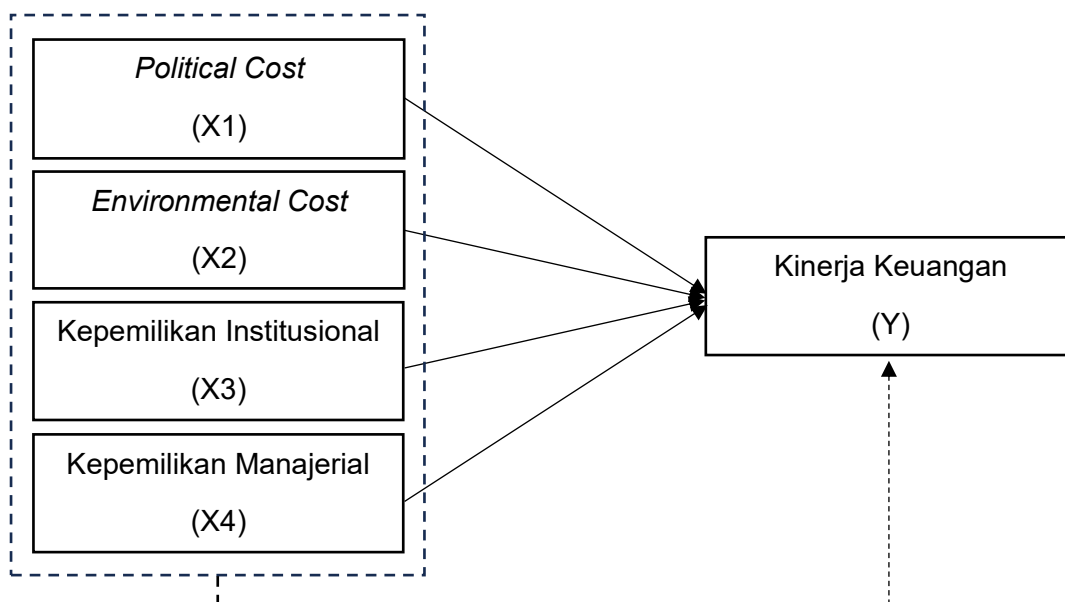
			Metode: Kuantitatif	Kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
8.	Ramadhani & Andayani, (2020)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening	Variabel: X1: Kepemilikan Institusional X2: Kepemilikan Manajerial Y: Nilai Perusahaan Z: Kinerja Keuangan Metode: Kuantitatif	Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
9.	Suandi & Ruchjana, (2021)	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Biaya Lingkungan Terhadap <i>Return on Assets (ROA)</i>	Variabel: X1: Kinerja Lingkungan X2: Biaya Lingkungan Y: ROA Metode: Kuantitatif	Kinerja lingkungan dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap ROA jika diuji secara parsial dan simultan.
10.	Zainab & Burhany, (2020)	Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan, dan Kinerja Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur	Variabel: X1: Biaya Lingkungan X2: Kinerja Lingkungan Y: Kinerja Keuangan Metode: Kuantitatif	Biaya lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Secara simultan biaya lingkungan dan kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

Uraian tabel tersebut menjelaskan bahwa terdapat kesamaan pada penelitian saat ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewata *et al.*, (2018) dan Andini *et al.*, (2023)

dimana variabel independennya merupakan *Polical Cost* dan variabel dependennya merupakan *Return On Aset*. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Dewata *et al.*, (2018) dan Andini *et al.*, (2023) struktur kepemilikan yang digunakan adalah kepemilikan asing sedangkan pada penelitian ini struktur kepemilikan yang digunakan adalah kepemilikan institusional dan manajerial.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengkaji serta menguji pengaruh *environmental cost*, *political cost*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas yakni ROA pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Kerangka konseptual untuk penelitian ini sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

—→ : Uji Parsial

---→ : Uji Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Political Cost* terhadap Kinerja Keuangan

Anggasari & Aji, (2018) menjelaskan bahwa perusahaan besar atau laba yang tinggi cenderung menghadapi tekanan politik yang lebih besar. Tekanan ini menciptakan beban biaya yang muncul akibat intervensi pihak eksternal, seperti kewajiban pajak yang tinggi, kebijakan lingkungan, serta tekanan dari kelompok kepentingan. Berdasarkan *goal setting theory*, keberadaan *political cost* dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan. Adanya penetapan target ROA yang tinggi akan memandang *political cost* sebagai faktor yang harus dikelola secara terukur. Manajemen merancang sebuah strategi untuk mengurangi biaya yang timbul dari eksternal perusahaan. Hal ini selaras dengan prinsip dari *goal setting theory*, dimana penyesuaian perilaku dan alokasi sumber daya memiliki tujuan sebagai pengurangan terhadap hambatan dan memaksimalkan peluang yang mendukung pencapaian tujuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miswanto *et al.*, (2017) dan Anggarsari & Aji, (2018) *political cost* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan alat ukurnya ROA atau profitabilitas. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan hipotesis kedua pada penelitian ini sebagai berikut.

H₁: *Political cost* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

2.4.2 Pengaruh *Environmental Cost* terhadap Kinerja Keuangan

Dewata *et al.*, (2018) menjelaskan bahwa *environmental cost* merupakan suatu investasi serta biaya, Biaya tersebut dialokasikan dengan tujuan upaya pencegahan oleh perusahaan untuk meminimalisir efek dari lingkungan, seperti perbaikan setelah bencana, perbaikan lingkungan, serta aktivitas lainnya. Perusahaan berusaha untuk mengungkapkan informasi lingkungan dengan tujuan

memberi sinyal untuk memancing investor dan menjadi bukti bahwa perusahaan telah bertanggung jawab terhadap lingkungan, namun dilain sisi perusahaan harus menyadari adanya konsekuensi dari pengungkapan tersebut, yakni biaya lingkungan yang tinggi. Barnett & Salomon (2005), menyatakan bahwa modal dari pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan menimbulkan efek negatif pada kinerja keuangan perusahaan yang dalam hal ini profitabilitas karena kegiatan tersebut belum bisa dijadikan sebagai rancangan persaingan dengan kompetitor perusahaan, sehingga *cost* yang perusahaan keluarkan untuk lingkungan justru mengurangi profitabilitas perusahaan yang akan berefek negatif dalam kinerja keuangan. Berdasarkan *stakeholder theory*, *environmental cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan secara konsisten dan efektif mampu meningkatkan legitimasi perusahaan pada pemangku kepentingan. Adanya legitimasi yang diperoleh oleh perusahaan dianggap mampu menjaga keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan dan berpotensi untuk meningkatkan ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Makmur, (2024), Suandi dan Ruchjana, (2021), Hapsari *et al.*, (2021), Bamidele *et al.*, (2025), dan Putri, (2023) memperlihatkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA atau profitabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan hipotesis pertama pada penelitian saat ini sebagai berikut.

H₂: *Environmental cost* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan *agency theory*, kepemilikan institusional memiliki peran sebagai mekanisme pengawasan terhadap aktivitas manajemen, hal ini disebabkan institusi memiliki sumber daya, keahlian, dan insentif untuk memantau kinerja manajer secara efektif. Adanya investor institusional yang signifikan

cenderung mendorong manajemen untuk bertindak efisien dan selaras pada kepentingan pemilik saham, yang pada akhirnya mampu menaikkan kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional mampu mengurangi adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Kepemilikan institusional dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi mekanisme *corporate governance* dari perusahaan dapat sehat. Penelitian oleh Noviawan & Septiani, (2013), Nathanael & Paramitha, (2024), Saifi, (2019), Ramadhani & Andayani, (2020), dan Abedin *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA atau profitabilitas. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan hipotesis ketiga dalam penelitian saat ini sebagai berikut.

H₃: Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh manajer atau pihak internal perusahaan yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. *Agency theory* menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dapat mengurangi konflik kepentingan diantara manajer dan pemegang saham. Apabila manajer memiliki saham perusahaan, mereka memiliki peran yang lebih kuat untuk meningkatkan nilai perusahaan karena terdapat kepentingan yang sama dengan pemegang saham. Manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka juga merasakan manfaat dari keputusan yang mereka ambil serta menanggung kerugian apabila keputusan yang mereka ambil salah. Penelitian oleh Wiranata & Nugrahanti, (2013), Noviawan & Septiani, (2013), Saifi, (2019), Maknun & Fitria, (2019), dan Katper *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap

kinerja keuangan perusahaan dengan alat ukurnya berupa ROA atau profitabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan hipotesis keempat dari penelitian ini sebagai berikut.

H₄: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

2.4.5 Pengaruh *Political Cost*, *Environmental Cost*, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Jensen dan Meckling (1976), bahwa *principal* dan *agent* sering kali menghadapi *agency conflict* yang memengaruhi manajer perusahaan untuk membuat kebijakan untuk menghindari tanggapan negatif dari pihak eksternal perusahaan atau pemangku kepentingan. Struktur kepemilikan yang kuat pada suatu perusahaan dianggap mampu mendorong pengelolaan biaya eksternal perusahaan seperti *political cost* dan *environmental cost* menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga perencanaan serta kebijakan dari pemilik saham dalam hal ini institusional dan manajerial sangat berpengaruh terhadap pengelolaan biaya eksternal tersebut. Hal ini sejalan juga dengan *goal setting theory* yang menjelaskan bahwa penetapan tujuan merupakan hal yang penting bagi manajemen perusahaan dalam memengaruhi kinerja yang dihasilkan. *Goal setting* yang telah ditentukan akan menjadikan perusahaan untuk terfokus pada peningkatan kinerja sosial dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewata *et al.* (2018), menunjukkan adanya pengaruh signifikan apabila variabel *political cost*, *environmental cost*, dan struktur kepemilikan diuji secara simultan. Hal ini berhubungan dengan penelitian sebelumnya, yakni Kusumardana *et al.* (2022), yang menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *political cost* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diuji secara simultan. Hasil

dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat peran penting antara pihak eksternal dan tata kelola perusahaan dalam menentukan profitabilitas serta efisiensi suatu perusahaan. *Environmental cost* juga dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dimana perusahaan harus menanggung beban finansial yang mampu mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditentukan hipotesis kelima dari penelitian ini sebagai berikut.

H₅: *Political cost, environmental cost*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan